

**BUDAYA ANTI KORUPSI DALAM KONTEKS PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN: KAJIAN REFLEKTIF PADA SEKOLAH DASAR**

Agus Riyan Oktori¹, Shaleh², Via Haiyun Karimah³, Yosi Yulizah⁴

^{1,2,4}Doktoral PGMI, FITK, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

³Magister PGMI, FITK, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

¹agusriyanoktori@iaincurup.ac.id, ²shaleh@uin-suka.ac.id

³vhaiyunkarimah04@gmail.com, ⁴chieyosi@iaincurup.ac.id

ABSTRACT

Corruption can hinder development and threaten political stability. The government addresses this through the National Corruption Prevention Strategy (Stranas PK) and implementing anti-corruption education in the world of education. This article will try to explore anti-corruption culture from the perspective of civic education studies by focusing on studies at the elementary school level with the initial assumption that anti-corruption culture should be introduced from elementary age as an effort to minimize corrupt behavior in the future, because it will provide extraordinary impact on the progress and development of the Indonesian nation itself. The method used is a literature study, with secondary data from national and international journals. The results of the analysis show that education is one of the socialization agents that plays a role in instilling anti-corruption values which are then manifested in a person's attitudes and behavior. One of the best ways to build anti-corruption values is through education, one of which is citizenship education. Anti-corruption education is a preventive action that can help create an anti-corruption culture. Elementary schools as initiators of initial learning at the educational level should receive special priority regarding strengthening anti-corruption culture from an early age. Therefore, citizenship education is one of the steps to strengthen anti-corruption cultural values to a greater extent at the educational level, especially elementary schools. Various formulations can be used as alternatives to build an anti-corruption culture so that it continues to exist at all times, including referring to several indicators, namely, starting from oneself, family, school and society.

Keywords: Anti Corruption Culture, Citizenship Education, Elementary School

ABSTRAK

Korupsi dapat menghambat pembangunan dan mengancam stabilitas politik. Pemerintah mengatasi ini melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan menerapkan pendidikan anti korupsi di dunia pendidikan. Tulisan ini akan mencoba menelusuri budaya anti korupsi dalam perspektif kajian pendidikan kewarganegaraan dengan memfokuskan pada kajian di level sekolah dasar dengan asumsi awal bahwasanya budaya anti korupsi seyogyanya sudah harus mulai dikenalkan sejak usia dasar sebagai upaya meminimalisir perilaku korupsi di masa yang akan datang, karena akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia sendiri. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan data sekunder dari jurnal nasional dan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu agen sosialisasi yang berperan dalam penanaman nilai anti korupsi yang

kemudian terwujud dalam sikap dan perilaku seseorang. Usaha untuk melakukan konstruksi atas nilai anti korupsi, salah satunya tepat dilakukan melalui pendidikan, salah satunya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan preventif yang dapat membantu terciptanya budaya anti korupsi. Sekolah dasar sebagai penggagas pembelajaran awal pada jenjang pendidikan seyogyanya harus mendapat prioritas khusus terkait penguatan budaya anti korupsi sejak dini. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu langkah untuk menguatkan nilai-nilai budaya anti korupsi semakin luas pada jenjang pendidikan, khususnya sekolah dasar. Beragam formulasi dapat dijadikan alternatif untuk membangun budaya anti korupsi agar tetap terus eksis setiap zamannya, diantaranya dapat merujuk pada beberapa indikator ini yakni, di mulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah dan masyarakat.

Kata Kunci: Budaya Anti Korupsi, Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Dasar

A. Pendahuluan

Indonesia dan korupsi memberi kesan tentang dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia begitu identik dengan persoalan korupsi dan korupsi juga begitu identik dengan Indonesia. (Mustofa & Akhwani, 2019) Korupsi saat ini merupakan realitas tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum pada tingkat kulminasi. Korupsi menghasilkan dampak yang menghambat pembangunan dalam berbagai sektor. korupsi merupakan tindakan yang buruk dan sebagai ancaman terhadap pemerintahan yang demokratis.

Korupsi juga menaruh ancaman terhadap stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan (Eliezar, 2020) Keprihatinan muncul karena pelaku korupsi ditemukan baik di lembaga pemerintah maupun swasta, serta melibatkan pimpinan

lembaga yang sejatinya menjadi *role model* bagi generasi muda.

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012–2025 dan jangka menengah tahun 2012–2014. (Muslimin et al., 2023)

Pada 2018, Stranas PPK tersebut disempurnakan menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan

korupsi. Dengan demikian, pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung. (Badan Pusat Statistik, 2018)

Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2023 (kecuali 2016), BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang bertujuan untuk mengukur tingkat perilaku antikorupsi masyarakat dengan menggunakan IPAK. Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*).

Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*graft/gratuities*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*), dan sembilan nilai antikorupsi. (Badan Pusat Statistik, n.d.)



Gambar 1: Sumber Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Pendidikan merupakan sarana atau respons yang tepat untuk meningkatkan ketahanan etika bangsa melalui reformasi sosial, yang dapat menjadi pemicu bagi terjadinya reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan secara eksternal dapat memagari kemungkinan perilaku korupsi; dan reformasi masyarakat secara internal dapat memagari kemungkinan tumbuh dan berkembangnya perilaku korupsi. Semua ini dapat memperbaiki hukum, atau aspek kelembagaan, serta memperbaiki. (Nur, 2021)

Pendidikan anti korupsi tidak dirancang untuk memberantas korupsi tapi mencegah dengan jalan melatih orang untuk memiliki

kesadaran untuk berperilaku anti koruptif. Pendidikan anti koruptif tidak akan memiliki daya guna jika karakter yang terbentuk masih bukan karakter anti koruptif.

Dunia pendidikan harus mengakui begitu pentingnya dan perlunya kembali kepada pendidikan moral yang dikerucutkan kepada pendidikan anti korupsi di sekolah untuk membentuk watak dan kepribadian siswa sehingga mereka menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. (Mustofa & Akhwani, 2019)

Pendidikan Anti Korupsi dalam dunia pendidikan sangat perlu adanya, jadi sebenarnya nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi menjadi tanggung jawab semua pendidik, betapa pentingnya peran pendidik yaitu guru, dalam menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, sehingga benih-benih korupsi tidak muncul, karena tanpa disadari dari kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut, dapat menanamkan dan melahirkan bibit dan nilai koruptif pada para diri siswa. (Widiartana & Setyawan, 2020)

Setidaknya terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi ini. Pertama untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal. Kedua adalah, menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa. (Harahap et al., 2023)

Oleh karena itu, pada tulisan ini akan mencoba menelusuri budaya anti korupsi dalam perspektif kajian pendidikan kewarganegaraan dengan memfokuskan pada kajian di level sekolah dasar dengan asumsi awal bahwasanya budaya anti korupsi seyogyanya sudah harus mulai dikenalkan sejak usia dasar sebagai upaya meminimalisir perilaku korupsi di masa yang akan datang, karena akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kemajuan dan

perkembangan bangsa Indonesia sendiri.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, di mana data dikumpulkan dengan memahami dan menganalisis teori-teori dari berbagai literatur atau referensi. Informasi diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya, kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan ide yang diajukan. (Amruddin, 2022)

Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ide dan masalah yang sesuai dengan variabel penelitian. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi mengenai variabel serupa dan hipotesis yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya.

Proses penelitian dimulai dengan membaca artikel yang dipilih sebagai sumber literatur, kemudian direview dan dianalisis untuk menjelaskan keterkaitannya dengan isu yang menjadi topik dalam artikel ini. Langkah terakhir yang dilakukan

adalah mengembangkan data-data tersebut menjadi sebuah hasil yang padu. (Adlini et al., 2022).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berupaya untuk memfokuskan kajian dalam penulisan ini, beberapa indikator coab dirumuskan untuk menarik suatu benang merah terkait pembahasan budaya anti korupsi dalam konteks pendidikan kewarganegaraan yang ada di sekolah dasar. membangun budaya anti korupsi ditengah masyarakat saat realisasi praktik nepotisme tumbuh subur dan mematikan karakter berintegritas di masyarakat akan sangat sulit dan tidaklah mudah, terutama disebabkan karena nilai kewajaran yang berlandaskan gotong royong dan tumbuhnya toleransi yang tiada batas.

1. Sejarah Awal Munculnya Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia

Terdapat tiga tahapan perkembangan korupsi di Indonesia, antara lain: elitis, endemik, dan sistemik. Tahap elitis berarti bahwa korupsi menjadi patologi sosial yang khas di kalangan kaum elit atau pejabat. Tahap endemik yaitu wabah korupsi yang diawali dari kalangan

orang_orang berpengaruh kemudian menjangkau hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Tahap sistemik terjadi ketika korupsi dilakukan oleh setiap individu dalam sistem dalam masyarakat yang memiliki sistem budaya dan lembaga yang korup maka akan membentuk individu yang korup meski sebesar apapun kesalehan individu.(Eliezar, 2020)

Gerakan pembarantasan korupsi sudah dimulai sejak adanya produk hukum anti-korupsi yang diterbitkan penguasa militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut tahun 1957 dengan nama Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/ PM/06/1957. Bahkan, jaksa Agung Soeprato (1950-1959) berani melakukan langkah besar dengan memeriksa menteri dan tokoh-tokoh kunci partai politik besar terindikasi melakukan korupsi.(Rahmawati, 2023)

Pada masa ini Orde Lama sebenarnya telah dibentuk sebuah badan yang khusus menangani masalah korupsi ini. Dibentuklah Panitia Retooling Aparatur Negara atau disingkat Paran. Badan ini dipimpin Oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani.(Nestariana, 2023)

Berikut terbentuknya peraturan-peraturan pembrantasan korupsi :
(Widiartana & Setyawan, 2020)

- a. Delik korupsi dalam KUHP;
- b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950;
- c. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- f. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih danBebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- g. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h. Undang-UndangNo. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- i. Undang-UndangNo. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;

- j. Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003;
- k. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- l. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Pencegahan dan pemberantasan korupsi mempunyai strategi dalam penekanan pada pentingnya edukasi atau pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi diharapkan membuat orang takut untuk melakukan tindakan korupsi dan beretika pada tindakan yang koruptif. Konsep pendidikan anti korupsi dalam keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. (Wati, 2022)

Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi

di berbagai lini kehidupan mulai dari keluarga, kampus dan masyarakat.

2. Anti Korupsi, Nasionalisme, dan Pendidikan Kewarganegaraan

Pengembangan integritas yang dimiliki seseorang menurut seorang partisipan tidak terlepas dari keimanannya pada Tuhan saja. Akan tetapi partisipan mengaitkan dengan pemahaman bahwa korupsi merupakan tindakan yang salah. Akar perilaku korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi sejak dini (anak_anak), diharapkan individu memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. (Damri et al., 2020)

Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Terdapat sembilan nilai antikorupsi yang dirumuskan oleh KPK. Sembilan nilai tersebut adalah Jujur, Disiplin, Tanggung jawab, Adil, Berani, Peduli, Kerja Keras, Mandiri, dan Sederhana.

Tabel 1. Indikator Sembilan Nilai Anti Korupsi

No	Nilai	Indikator	Nilai di Sekolah Dasar
1	Jujur	Berbicara dan berbuat sesuai fakta	

		Tidak curang Tidak berbohong Tidak mengakui hak orang lain
2	Disiplin	Komitmen untuk berperilaku konsisten pada aturan yang ada
3	Tanggung Jawab	Selalu berupaya untuk menuntaskan pekerjaan dengan hasil yang terbaik
4	Adil	Menghargai perbedaan Tidak pilih kasih
5	Berani	Berani jujur Berani mengakui kesalahan Berani menolak ajakan kecurangan
6	Peduli	Menjaga diri dan lingkungan Bersikap simpati dan empati
7	Kerja Keras	Selalu berupaya dengan semampunya
8	Mandiri	Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa bantuan orang lain
9	Sederhana	Berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, dan tidak pamer

Nilai-nilai nasionalisme selalu dikaitkan dengan dunia pendidikan, karena untuk memaknai penanaman nilai-nilai tersebut diperlukan suatu upaya dari masyarakat Indonesia sendiri untuk berperilaku yang mengarah pada nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, maka untuk mengisi dan meneruskan kemerdekaan saat ini, sangat diperlukan jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi dari tiap-tiap warga negara. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan usaha yang keras dan serius, dan untuk mewujudkannya tidaklah harus selalu tampak dimata orang lain, akan tetapi bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana sampai pada hal-hal yang kompleks.(Nasri, 2020)

Terkait dengan penanaman nilai nasionalisme di era global sekarang ini, salah satu lembaga formal yang ikut bertanggung jawab adalah satuan pendidikan, dan salah satunya sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan lembaga formal yang menjadi pondasi awal untuk jenjang sekolah di atasnya. (Aeni, 2020)

Pendidikan di sekolah dasar mempunyai peranan yang sangat

vital dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme. perlunya pengutamaan pendidikan nasionalisme sejak dini bagi setiap individu melalui pembiasaan di sekolah. Pendidikan nasionalisme menjadi sebuah jalan keluar bagi proses perbaikan bangsa dan negara Indonesia. Situasi sosial yang ada menjadi alasan utama agar pendidikan nasionalisme segera digalakkan kembali dalam lembaga pendidikan.

Bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme sejak dini, sejak kecil, atau sejak masa sekolah dasar. Karena jika sikap nasionalisme terlambat diimplementasikan kepada bangsa Indonesia, bangsa Indonesia telah kehilangan generasi muda yang rendah akan sikap nasionalisme.(Annisa et al., 2023) Maka untuk menanggulangi masalah tersebut dan untuk menambah rasa nasionalisme bangsa Indonesia adalah dengan dilatih tentang sikap-sikap yang baik sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila, tidak mengajarkan hal-hal yang melanggar nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini, dan memberi penyuluhan kepada seluruh bangsa Indonesia akan pentingnya

nasionalisme terhadap masa depan bangsa Indonesia. Karena rasa nasionalisme dan cinta tanah air sangat diperlukan untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Memupuk rasa nasionalisme generasi muda bisa dilakukan sejak dini, sehingga lambat laun seiring dengan usia diharapkan rasa nasionalisme tetap bertahan pada diri bangsa Indonesia.(Damayanti & Rahmawati, 2021)

Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia.(Insani et al., 2021) Nilai luhur dan moral ini diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan siswa sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan antar warga dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Dalam hal ini pembelajaran PKn di sekolah dasar dimaksudkan sebagai suatu proses belajar mengajar dalam rangka membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam pembentukan karakter bangsa yang diharapkan mengarah 29 pada penciptaan suatu masyarakat yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila, UUD, dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan sekolah.(Gawise et al., 2022)

Karakter merupakan kekuatan dan kemudian yang akan mengendalikan kehidupan suatu bangsa agar tidak terombang-ambing.(Afrizal et al., 2020) Jika warga suatu negara memiliki karakter yang baik maka masa depan negara tersebut kemungkinan besar akan baik. Perkembangan moral anak-anak di Indonesia sekarang ini sangat minim sekali. Dari anak-anak kalangan bawah maupun anak-anak kalangan atas sikap mereka terhadap negara kurang ikut berpartisipasi dalam menjaga keutuhan negara.

Jenjang pendidikan sekolah dasar merupakan pondasi untuk

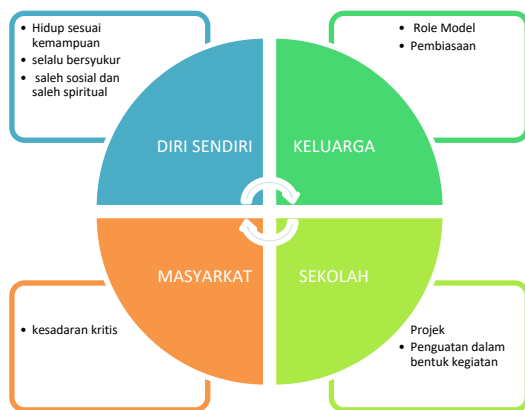
pembentukan karakter bangsa yang baik dan berguna. Dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan ini diharapkan anak-anak di Indonesia bisa memperbaiki moral mereka dengan kesadaran dirinya sendiri. Itupun orang tua dan pemerintah juga harus ikut berpartisipasi dalam mendukung perbaikan moral pada anak-anak yang ada di Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.(Syaparuddin et al., 2020)

Pendidikan karakter menjadi salah satu yang penting dalam menciptakan generasi bangsa di Indonesia. Melalui pendidikan karakter peserta didik diajarkan untuk memiliki sikap dan perilaku yang baik. Pendidikan karakter bertujuan untuk kembali menghidupkan karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain nilai ketaqwaan, nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai kepedulian, hingga nilai etika atau sopan santun.(Ahyati & Dewi, 2021)

PKn merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam pendidikan karakter kepada peserta didik, karena tujuan PKn pada dasarnya adalah untuk menciptakan peserta didik menjadi

warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (Santosa & Zaenuri, 2022) Oleh karena itu, pendidikan karakter tepat diimplementasikan melalui PKn dalam membentuk akhlak generasi muda.

3. Strategi Pengembangan Budaya Anti Korupsi di SD/MI Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan



D. Kesimpulan

Kesimpulan Pendidikan merupakan salah satu agen sosialisasi yang berperan dalam penanaman nilai anti korupsi yang kemudian terwujud dalam sikap dan perilaku seseorang. Usaha untuk melakukan konstruksi atas nilai anti korupsi, salah satunya tepat dilakukan melalui pendidikan, salah satunya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan preventif

yang dapat membantu terciptanya budaya anti korupsi. Sekolah dasar sebagai penggagas pembelajaran awal pada jenjang pendidikan seyogyanya harus mendapat prioritas khusus terkait penguatan budaya anti korupsi sejak dini.

Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu langkah untuk menguatkan nilai-nilai budaya anti korupsi semakin luas pada jenjang pendidikan, khususnya sekolah dasar. Beragam formulasi dapat dijadikan alternatif untuk membangun budaya anti korupsi agar tetap terus eksis setiap zamannya, diantaranya dapat merujuk pada beberapa indikator ini yakni, di mulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M., Dinda, A., Yulinda, S., & ... (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal ...*, Query date: 2023-12-15 16:05:36. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394>
- Aeni, K. (2020). Metode Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar (Studi Kasus Di SDIT Bias Assalam Kota Tegal). ... *Perseda: Jurnal Pendidikan Guru*

- Sekolah Dasar, Query date: 2023-05-24 14:39:31.
<https://www.jurnal.ummi.ac.id/index.php/perseda/article/view/1021>
- Afrizal, S., Kuntari, S., Setiawan, R., & ... (2020). Perubahan Sosial pada Budaya Digital dalam Pendidikan Karakter Anak. ... *Nasional Pendidikan ...*, Query date: 2023-05-24 06:05:24.
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/9965>
- Ahyati, A., & Dewi, D. (2021). Implementasi Bela Negara Di Era Teknologi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal on Education*, Query date: 2024-06-12 07:31:03.
<https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/371>
- Amruddin, S. (2022). Paradigma Kuantitatif, Teori Dan Studi Pustaka. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Query date: 2024-05-06 05:43:57.
https://www.academia.edu/download/106339608/Buku_Digital_Metodologi_Penelitian_Kuantitatif_dan_Kualitatif.pdf#page=16
- Annisa, F., Martati, B., & Putra, D. (2023). Penerapan Karakter Religius, Nasionalis, Dan Integritas Dalam Budaya Sekolah Dasar. ... *PENDIDIKAN ...*, Query date: 2023-05-24 14:39:31.
<https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/glasser/article/view/2267>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved August 18, 2023, from <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- Badan Pusat Statistik. (2018). <https://www.bps.go.id/publication/2018/11/26/81ede2d56698c07d510f6983/statistik-kesejahteraan-rakyat-2018.html>
- Damayanti, I., & Rahmawati, R. (2021). Analisis Nilai-Nilai Karakter Dalam Materi Pkn Kelas Tinggi Untuk Tingkat Madrasah Ibtidaiyah. ... *(Jurnal Pendidikan ...)*, Query date: 2023-10-25 13:10:41.
<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema/article/view/27>
- Damri, M., Putra, F., & Kom, M. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dwBEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA107&dq=pembelajaran+pkn+kewarganegaraan&ots=lisQ1631m8&sig=hM69kmF5CAb4CNcgzd3ksFeN-T0>
- Eliezar, D. (2020). Pendidikan anti korupsi dalam budaya Jawa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Query date: 2024-06-12 07:29:52.
<https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/2754>
- Gawise, G., Jamin, M., & Azizah, F. (2022). Peranan Media Pembelajaran dalam Penguatan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Query

- date: 2024-06-12 07:31:03.
<https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/2669>
- Harahap, N., Sitompul, S., & ... (2023). Pentingnya pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. *Jurnal Ilmiah ...*, Query date: 2024-06-12 06:08:00. <http://marsipature.makarioz.org/index.php/marsipature/article/view/38>
- Insani, G., Dewi, D., & Furnamasari, Y. (2021). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Query date: 2024-06-12 07:31:03. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2313>
- Muslimin, D., Kusumawati, I., Asman, A., Mustanir, A., & ... (2023). *Pendidikan Anti Korupsi*. repository.unismabekasi.ac.id. <http://repository.unismabekasi.ac.id/id/eprint/2600>
- Mustofa, M., & Akhwani, A. (2019). Strategi penanaman nilai-nilai antikorupsi di sekolah dasar. *Education and ...*, Query date: 2023-05-24 14:39:31. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1680804&val=15611&title=STRATEGI%20PENANAMAN%20NILAI-NILAI%20ANTIKORUPSI%20DI%20SEKOLAH%20DASAR>
- Nasri, U. (2020). Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, Query date: 2024-06-12 07:29:52. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alhikmah/article/view/3820>
- Nestariana, N. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, Query date: 2024-06-12 07:29:52. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/spp/article/view/74>
- Nur, S. (2021). Penerapan pendidikan anti korupsi kepada siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Query date: 2024-06-12 06:08:00. <https://www.academia.edu/download/87689088/4144-8295-1-SM.pdf>
- Rahmawati, R. (2023). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, Query date: 2024-06-12 07:29:52. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/spp/article/view/76>
- Santosa, S., & Zaenuri, Z. (2022). Analisis Materi Pendidikan dan Kewarganegaraan (PKn) Di SD/MI. ... *Pendidikan ...*, Query date: 2023-10-25 13:10:41. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/4898>
- Syaparuddin, S., Meldianus, M., & ... (2020). Strategi pembelajaran aktif dalam meningkatkan motivasi belajar pkn peserta didik. ...: *Jurnal Pendidikan*

Guru ..., Query date: 2023-06-20 16:12:52.
<https://ummaspul.e-journal.id/MGR/article/download/326/154>

Wati, S. (2022). Pentingnya pendidikan tentang anti korupsi kepada mahasiswa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Query date: 2024-06-12 07:29:52. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/438>

Widiartana, G., & Setyawan, V. (2020). Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Query date: 2024-06-12 06:08:00. <https://scholar.archive.org/work/nytm7j2rljc5rktlpzuptakulu/access/wayback/https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/download/1352/1187>